

PERAN PARTAI DEMOKRAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KABUPATEN PANDEGLANG

Hira Kafhaya, Ahmad Zaenudin, Putri Nabila, Ratu Milah Hamdalah*

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

Email*: ratumilla@gmail.com

Abstrak. Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator penting dalam keberlangsungan demokrasi lokal. Partai politik memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem politik, terutama dalam mendorong keterlibatan warga dalam proses pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Partai Demokrat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Pandeglang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus DPC Partai Demokrat, tokoh masyarakat, dan pemilih, disertai observasi serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui strategi komunikasi politik yang berkelanjutan, pendekatan langsung kepada masyarakat, penguatan konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput, serta pelaksanaan pendidikan politik dan kegiatan sosial. Kegiatan roadshow, silaturahmi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi instrumen utama dalam membangun kedekatan emosional dan kepercayaan publik terhadap partai. Dalam perspektif ekologi pemerintahan, peran tersebut memperkuat relasi antara masyarakat, aktor politik, dan lingkungan sosial lokal. Meskipun demikian, partisipasi politik masyarakat masih cenderung bersifat elektoral-prosedural, ditandai dengan tingginya kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, namun rendahnya keterlibatan dalam aktivitas politik non-elektoral. Faktor literasi politik, kepercayaan publik, kondisi sosial-ekonomi, dan kejenuhan politik menjadi tantangan utama dalam mendorong partisipasi politik yang lebih substantif.

Kata Kunci: Peran Partai, Partai Demokrat, Partisipasi Politik, Kabupaten Pandeglang.

Abstract. Community political participation is an important indicator in the sustainability of local democracy. Political parties have a strategic role as a liaison between society and the political system, especially in encouraging citizen involvement in the election process. This study aims to analyze the role of the Democratic Party in increasing public political participation in the 2024 Legislative Election in Pandeglang Regency. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. The data collection technique was carried out through in-depth interviews with Democratic Party DPC administrators, community leaders, and voters, accompanied by observation and documentation studies. Data analysis is carried out interactively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the Pandeglang Regency Democratic Party plays an active role in increasing community political participation through sustainable political communication strategies, direct approaches to the community, strengthening organizational consolidation to the grassroots level, and implementing political education and social activities. Roadshow activities, gatherings, and community empowerment are the main instruments in building emotional closeness and public trust in the party. In the perspective of government ecology, the role strengthens the relationship between communities, political actors, and the local social environment. However, people's political participation still tends to be electoral-procedural, characterized by high voter attendance at polling stations, but low involvement in non-electoral political activities. Factors of political literacy, public trust, socio-economic conditions, and political saturation are the main challenges in encouraging more substantive political participation.

Keywords: Role of The Party, Democratic Party, Political Participation, Pandeglang Regency.

Copyright©2026. Hira Kafhaya dan kawan-kawan

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license

DOI: <https://doi.org/10.1234/ssrj.v3i1.52>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara menganut sistem demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Pasca reformasi, pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (hasil amandemen) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, hal ini menjadi dasar konstitusional bahwa masyarakat memiliki kebebasan atas pilihannya sendiri, perubahan undang-undang dan amandemen ini membuka ruang kompetisi multipartai dengan ke-partaian berjumlah 48 partai politik peserta dengan 21 partai berhasil meraih kursi di DPR, yang mendorong partisipasi politik masyarakat melalui pemilihan umum.

Dalam sistem demokrasi, tentunya partisipasi politik ini menjadi tolak ukur pemerintahan dalam menjalankan sistemnya. Penyelenggaraan sistem demokrasi ini melibatkan masyarakat dalam pengelolaan politik, diantaranya masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mempengaruhi keputusan politik. Oleh karena itu partisipasi politik menjadi begitu penting dalam penyelenggaraan sistem demokrasi dan legitimasi.

Partai politik memainkan peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam struktur demokrasi. Partai politik sebagai organisasi yang sah menurut konstitusi, tidak hanya melakukan rekrutmen politik, tetapi juga menjalankan fungsi diantaranya sebagai edukasi politik, menyalurkan aspirasi rakyat, partisipasi politik, serta sarana komunikasi politik. Sejauh mana partai politik dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Partai Demokrat mulai menunjukkan eksistensinya dalam politik nasional sejak seiring terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, yang juga merupakan pendiri Partai Demokrat. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode pemerintahan berkontribusi terhadap meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat, yang tercermin dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut sebagai pengusung utama pemerintahan.

Di tingkat lokal salah satu wilayah di Provinsi Banten, Partai Demokrat DPC Kabupaten Pandeglang berperan sebagai aktor utama dalam mengimplementasikan strategi partai untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan memanfaatkan jaringan kepengurusan hingga tingkat kecamatan (Pimpinan Anak Cabang) dan desa (Ranting), DPC Partai Demokrat melakukan berbagai kegiatan sosialisasi politik dan silaturahmi kepada masyarakat di setiap daerah pemilihan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat basis dukungan elektoral, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pemilihan legislatif. Sehingga pengaruh dari pusat juga menjangar ke setiap daerah khususnya Partai Demokrat di Kab. Pandeglang sebagai perpanjangan tangan dari pusat.

Menurut ekologi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai elemen, termasuk pemerintah, masyarakat, lingkungan sosial, budaya, dan aktor politik. Keberhasilan proses pemerintahan, termasuk peningkatan partisipasi politik, dipengaruhi oleh kualitas hubungan dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Jika partisipasi politik masyarakat rendah, itu bisa menjadi tanda bahwa interaksi tidak berjalan dengan baik dalam ekosistem pemerintahan tersebut, di mana masyarakat belum sepenuhnya

terlibat atau merasa terlibat dengan proses politik yang berlangsung.

Meskipun demikian, masih ada kendala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, salah satunya adalah sikap apatis sebagian warga terhadap kegiatan pemerintahan dan politik. Apatisme politik ini ditunjukkan dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan non-politik, diskusi politik, dan proses politik di luar pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi politik tidak hanya bergantung pada perolehan suara partai yang tinggi, tetapi juga pada kemampuan partai politik untuk mempertahankan kesadaran dan kepercayaan masyarakat.

Hal ini menjadi analisis menyeluruh tentang peran Partai Demokrat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bentuk peran, strategi, dan tantangan yang dihadapi Partai Demokrat dalam meningkatkan keterlibatan politik masyarakat.

LITERATUR REVIEW

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Andrian (2023) menegaskan bahwa komunikasi politik yang efektif dan berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Selanjutnya, Amanah dan Sa'adati (2021) menekankan fungsi pendidikan politik partai dalam membentuk kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian Susanti (2025) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik yang dilakukan partai politik umumnya masih bersifat elektoral dan cenderung meningkat menjelang pemilu, namun belum berdampak jangka panjang. Sementara itu, Pratiwi (2025) menyatakan bahwa kepercayaan publik dan kredibilitas partai merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Fatiya dan Windawati (2025) menambahkan bahwa inovasi strategi partai, khususnya dalam menjangkau pemilih pemula, berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi telah banyak dikaji, penelitian yang secara spesifik mengulas peran Partai Demokrat dalam konteks politik lokal Kabupaten Pandeglang pada Pemilu Legislatif 2024 masih terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana Partai Demokrat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Pandeglang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus DPC Partai Demokrat, tokoh masyarakat, serta pemilih; observasi aktivitas politik; dan studi dokumen seperti data KPU, dokumen partai, serta literatur terkait.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh temuan yang komprehensif mengenai strategi, hambatan, dan peran Partai Demokrat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang Periode 2022-2027

Di tingkat lokal, keberhasilan partai tidak hanya ditentukan oleh citra nasional, tetapi juga oleh kepemimpinan dan strategi organisasi partai di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang juga di sampaikan oleh Pratiwi (2025) menyatakan bahwa kepercayaan publik dan kredibilitas partai merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi politik masyarakat.

Periode kepemimpinan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang tahun 2019–2024 yang kini dipimpin oleh Bapak M.M Fuhaira Amin, SE. menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam pengelolaan organisasi dan pola komunikasi politik dengan masyarakat dengan melakukan Roadshow ke-6 Dapil Kabupaten Pandeglang. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Pak Sadikin selaku Direktur Eksekutif cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang menyampaikan bahwa:

Kami melakukan Roadshow (Silaturahmi ke rumah PAC) disetiap dapil dan beberapa desa kami datang, ketua DPC menyampaikan itu (ke pengurus yang ada maupun ke masyarakat itu sendiri). (Wawancara dengan Direktur Eksekutif cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, 26 November 2025).

Partai Demokrat tidak hanya melakukan kegiatan bersifat formal, akan tetapi bersifat Pendekatan kekeluargaan melalui kegiatan silaturahmi tersebut menunjukkan adanya strategi komunikasi politik yang lebih persuasif dan berbasis kedekatan sosial. Kehadiran pengurus partai secara langsung di tengah masyarakat tidak hanya memperkuat hubungan emosional antara partai dan pemilih, tetapi juga membangun persepsi positif terhadap eksistensi Partai Demokrat di tingkat akar rumput. Masyarakat tidak lagi memandang partai politik semata sebagai organisasi elit, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka.

Selain melalui pendekatan terbuka, DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang juga menerapkan strategi penguatan jaringan internal yang dikenal sebagai pendekatan *underground* atau jaringan bawah. Strategi ini dilakukan dengan membentuk dan mengaktifkan struktur kepengurusan hingga tingkat paling bawah, seperti PAC dan ranting, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai dalam menyampaikan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Pola ini memungkinkan penyampaian pesan politik dilakukan secara lebih personal dan berkelanjutan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Pak Sadikin selaku Direktur Eksekutif cabang menyampaikan bahwa:

Jadi salah satu caranya tadi, kami membentuk jaringan kepengurusan sampai tingkat bawah, nanti mereka yang akan menyampaikan informasi maupun edukasi kepada masyarakat, karna kami berharap agar bermanfaat bagi masyarakat, juga merasakan bahwa partai politik itu ada manfaatnya. (Wawancara dengan Direktur Eksekutif cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, 26 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai, kepemimpinan pada periode ini lebih menekankan pada penguatan konsolidasi internal, peningkatan soliditas kader, serta intensifikasi kegiatan partai di tingkat daerah pemilihan. Kegiatan seperti silaturahmi rutin, kunjungan ke masyarakat, serta keterlibatan kader dalam kegiatan

sosial menjadi strategi utama untuk memperkuat kedekatan antara partai dan masyarakat.

Perubahan pendekatan kepemimpinan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang periode 2019–2024 ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam memperkuat fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik dan penghubung antara masyarakat dan sistem politik yang berjalan lancar, dengan terbuktinya peraihan suara yang meningkat signifikan dari kepemimpinan Bapak Fuhaira Amin. Implementasi strategi tersebut berimplikasi pada peningkatan perolehan suara Partai Demokrat. Perbandingan hasil Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang

Dapil	Suara 2019	Suara 2024
1	11.188	13.531
2	9.898	17.221
3	10.415	18.089
4	11.316	17.891
5	14.119	11.761
6	13.980	19.241
Total	70.916	97.734
Peringkat Suara	4	1

Sumber: KPU Kabupaten Pandeglang, diolah peneliti, 2025.

Distribusi kursi yang merata menunjukkan bahwa strategi Partai Demokrat menjangkau seluruh wilayah secara proporsional. Dalam kerangka ekologi pemerintahan, hal ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan interaksi politik di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.

Dengan demikian, kepercayaan publik kian meningkat untuk memilih Partai Demokrat dengan perbedaan 26.818 suara yang di peroleh pada kepemimpinan ketua DPC Bapak M.M Fuhaira Amin di periode 2022-2027 ini. Hal ini menunjukkan peran strategis dalam meningkatkan partisipasi dan dukungan politik masyarakat melalui pendekatan organisasi yang lebih terbuka, komunikatif, dan berbasis kedekatan sosial. Perubahan pola kepemimpinan dan strategi politik tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan peningkatan perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Pandeglang.

Peran Partai Demokrat dalam Ekosistem Lokal

Sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan, Partai Demokrat berupaya menjalankan fungsi pendidikan politik dan artikulasi kepentingan melalui berbagai strategi salah satunya Roadshow. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Pak Sadikin selaku Direktur Eksekutif cabang menyampaikan bahwa:

Kalau yang kami rasakan hal ini, di Pandeglang yang mobile yang setia ada di masyarakat itu Demokrat, karena kami belum pernah menemukan setiap kami turun ke mana mana partai lainnya melakukan kegiatan kami lakukan, kecuali saat musibah kalau musibah semua partai pasti ikut serta, tetapi setiap bulan kami melakukan roadshow dari satu tempat ke tempat lainnya. Tahun 2022 setelah dilantiknya ketua DPC baru tahun 2023 itu sampai 2024 kita roadshow ke tempat

tempat wisata untuk meningkatkan UMKM pariwisata untuk memperkenalkan keunikan daerah tersebut, yang pertama mengadakan kegiatan besar di sana adalah Partai Demokrat sehingga diupload nya ke social media sehingga semua orang tahu dan bertanya-tanya apasih itu pariuk nangkub, apa itu citaman dan lain-lain". (Wawancara dengan Direktur Eksekutif cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, 26 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, strategi roadshow yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan silaturahmi politik, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekosistem politik lokal. Aktivitas rutin yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan adanya upaya membangun kedekatan emosional antara partai dan masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan loyalitas politik di tingkat akar rumput. Keberadaan partai yang konsisten hadir di tengah masyarakat menjadi pembeda utama dibandingkan partai lain yang cenderung aktif hanya pada momentum tertentu, seperti menjelang pemilu atau saat terjadi bencana.

Selain itu, roadshow yang dikombinasikan dengan kegiatan pemberdayaan UMKM dan promosi potensi wisata lokal mencerminkan peran partai sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam konteks ekologi pemerintahan, strategi ini memperlihatkan fungsi partai politik sebagai aktor non-pemerintah yang turut memperkuat relasi antara masyarakat, ekonomi lokal, dan sistem politik. Kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan citra positif Partai Demokrat, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik yang bersifat inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

Pemanfaatan media sosial untuk mendokumentasikan dan menyebarkan kegiatan roadshow turut memperkuat jangkauan komunikasi politik Partai Demokrat. Informasi mengenai potensi daerah seperti Pariuk Nangkub dan Citaman yang diangkat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa partai tidak hanya berorientasi pada elektoral, tetapi juga berperan dalam membangun identitas dan kebanggaan lokal. Hal ini memperkuat posisi Partai Demokrat sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai mediator antara aspirasi masyarakat dan proses politik di tingkat local. Bentuk peran partai Demokrat tersebut disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Bentuk Peran Partai Demokrat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Bentuk Peran	Implementasi	Dokumentasi
Pendidikan politik	Sosialisasi rutin dan roadshow	 <p>Roadshow, 13 Juli 2025.</p>

	 <p>Konsolidasi dan Pendidikan Politik, 18 Oktober 2025</p>
<p>Pendekatan langsung Silaturahmi dan kunjungan lapangan</p>	 <p>2x Silaturahmi menampung aspirasi serta Bantuan Sosial, 13 May dan 30 May 2025</p>
<p>Konsolidasi organisasi Pembentukan pengurus hingga RT</p>	 <p>Penyerahan PDH serta KTA, 18 Oktober 2025</p>
<p>Kegiatan sosial Pendampingan dan bantuan masyarakat</p>	 <p>Bantuan Sosial, 1 Agustus 2025</p>

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi partai, 2025.

Partai Demokrat tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai agen pendidikan politik di tingkat lokal. Dalam perspektif ekologi pemerintahan, peran tersebut berfungsi sebagai mekanisme penghubung yang memperkuat relasi antara masyarakat dan sistem politik lokal. Amanah dan Sa'adati (2021) menekankan bahwa pendidikan politik oleh partai berperan penting dalam

membentuk kesadaran politik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan roadshow oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana konsolidasi internal, tetapi juga sebagai ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya pertukaran aspirasi antara partai dan masyarakat. Pola ini menempatkan partai sebagai aktor yang aktif dalam membangun relasi antara struktur politik dan lingkungan sosial di tingkat lokal.

Pendekatan langsung melalui silaturahmi dan kunjungan lapangan memperkuat kedekatan emosional antara partai dan masyarakat. Andrian (2023) menegaskan bahwa komunikasi politik yang efektif dan berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Pola komunikasi yang bersifat kekeluargaan memungkinkan masyarakat merasa dilibatkan secara langsung dalam aktivitas partai, sehingga jarak antara elite politik dan basis pemilih dapat diminimalkan. Interaksi yang berkelanjutan ini sejalan dengan pandangan komunikasi politik yang menekankan pentingnya kepercayaan publik sebagai fondasi partisipasi politik.

Konsolidasi organisasi yang dilakukan hingga ke tingkat paling bawah menunjukkan strategi penguatan struktur partai secara sistematis. Fatiya dan Windawati (2025) menyatakan bahwa inovasi strategi partai, khususnya dalam menjangkau pemilih di tingkat akar rumput, berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik. Keberadaan jaringan pengurus di tingkat lokal berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai dalam menyampaikan informasi dan edukasi politik kepada masyarakat. Dalam kerangka ekologi pemerintahan, penguatan struktur organisasi ini menciptakan stabilitas hubungan antara aktor politik dan lingkungan sosialnya, sehingga memperkuat keberlanjutan relasi politik di tingkat lokal.

Kegiatan sosial berupa pemberian bantuan kepada masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pendekatan Partai Demokrat dalam membangun citra dan kedekatan dengan masyarakat. Namun, temuan Susanti (2025) menunjukkan bahwa aktivitas bantuan sosial yang dilakukan partai politik umumnya bersifat elektoral dan cenderung meningkat menjelang pemilu, sehingga dampaknya terhadap peningkatan partisipasi politik jangka panjang masih terbatas. Namun dalam konteks ini, kegiatan sosial yang dilakukan Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang tidak hanya lebih memfokuskan peningkatan suara menjelang pemilu saja, akan tetapi program kegiatan yang terlaksana berlanjut setelah pemilu tahun 2024 sampai 2025 berdasarkan dokumentasi. Sehingga hal ini menjadi sorotan publik mengenai aktifnya partai demokrat dalam mengayomi masyarakat.

Selain itu Pak Sadikin juga menyampaikan bahwa Partai Demokrat juga mengimplementasikan '*Punishment and reward*' dimana anggota atau kader Demokrat mendapatkan hukuman dan penghargaan, dimana hal ini menjadi ajang perolmbaan bagi kader aktif menumbuhkan rasa loyalitas kepada Partai Demokrat.

Secara keseluruhan, peran Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang dalam ekosistem lokal tercermin melalui pelaksanaan pendidikan politik, pendekatan langsung kepada masyarakat, konsolidasi organisasi, serta kegiatan sosial. Kombinasi strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat yang tercermin dalam peningkatan perolehan suara Partai Demokrat

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Perspektif Demokrasi Lokal

Partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pandeglang menunjukkan kecenderungan yang masih bersifat elektoral-prosedural. Hal ini terlihat dari tingginya

kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, namun rendahnya keterlibatan dalam aktivitas politik non-elektoral. Menurut wawancara yang kami ambil dari masyarakat mengatakan bahwa:

Menurut saya penting banget, karena itu merupakan acara menyampaikan aspirasi (memilih) kalau kami tidak ikut kita tidak bisa berharap banyak soal perubahan, dan saya selalu berusaha datang untuk memilih. (Wawancara dengan masyarakat Kabayan 20 November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang partisipasi politik terutama sebagai kewajiban elektoral, yakni memilih dalam pemilu untuk menyalurkan aspirasi dan harapan terhadap perubahan. Namun, pemahaman ini masih terbatas pada aspek prosedural dan belum diikuti dengan kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam proses politik di luar momentum pemilu. Pola tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Pandeglang

Bentuk Partisipasi Politik	Temuan Penelitian
Kehadiran di TPS	Relatif tinggi
Keterlibatan diskusi publik	Rendah
Pendidikan politik masyarakat	Minim
Keterlibatan dalam kegiatan partai	Terbatas

Sumber: Hasil wawancara dan olahan peneliti, 2025.

Temuan pada tabel 1 menguatkan pandangan Huntington dan Nelson bahwa partisipasi politik tidak dapat direduksi hanya pada kehadiran pemilih, tetapi harus dilihat dari keberlanjutan keterlibatan warga dalam proses politik. Rendahnya partisipasi non-elektoral menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Pandeglang masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif.

Dalam perspektif ekologi pemerintahan, kondisi ini mencerminkan hubungan antara masyarakat dan sistem politik yang masih bersifat transaksional dan periodik. Partisipasi muncul terutama ketika terdapat mekanisme formal seperti pemilu, sementara interaksi berkelanjutan antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah daerah masih belum optimal. Oleh karena itu, peran partai politik, termasuk Partai Demokrat, menjadi penting sebagai aktor penghubung yang tidak hanya mendorong kehadiran pemilih di bilik suara, tetapi juga memperluas partisipasi politik masyarakat ke ranah yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan mekanisme pemilu, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat merasa terjangkau, dilibatkan, dan memiliki pilihan politik yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik sebagian masyarakat di Kabupaten Pandeglang berkaitan erat dengan minimnya pendekatan langsung dari aktor politik serta kurangnya intensitas sosialisasi yang menyentuh masyarakat secara personal.

Hal tersebut tercermin dari pernyataan pengurus Partai Demokrat yang menyebutkan bahwa banyak masyarakat tidak berpartisipasi karena tidak memiliki kedekatan dengan calon maupun partai politik. Kurangnya ajakan dan interaksi

langsung membuat masyarakat merasa tidak memiliki pilihan politik yang relevan dengan kepentingan mereka.

Yang pertama tidak punya pilihan calon, karena tidak ada ajakan dan tidak tersentuh, dan itu yang paling banyak. (Wawancara dengan Direktur Eksekutif cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, 26 November 2025).

Selain faktor keterjangkauan, keterbatasan eksposur masyarakat terhadap aktivitas partai politik juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi. Beberapa informan masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat secara langsung kegiatan partai politik di lingkungannya, sehingga partai hanya dikenal melalui atribut visual seperti baliho dan spanduk, tanpa adanya interaksi substantif.

Tidak pernah melihat kegiatan partai demokrat, hanya melihat pemasangan baliho atau promosi yang di pasang di pinggir jalan. (Wawancara dengan masyarakat Batu Bantar 20 November 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan politik yang bersifat simbolik dan satu arah belum cukup efektif untuk mendorong partisipasi politik masyarakat. Sebaliknya, masyarakat cenderung lebih tertarik untuk terlibat apabila sosialisasi dilakukan secara komunikatif, jujur, dan mudah dipahami. Cara penyampaian pesan politik menjadi faktor penting dalam membangun ketertarikan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

Tergantung, bagaimana penyampaian dalam kegiatan sosialisasi tersebut, kalau memang penyampaian oke, secara linear dan jujur itu akan membuat warga lebih tertarik untuk mengikuti pemilu. (Wawancara dengan masyarakat Batu Bantar 20 November 2025).

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor utama yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat meliputi keterjangkauan aktor politik terhadap masyarakat, intensitas dan kualitas sosialisasi, serta kemampuan partai politik dalam membangun komunikasi yang bersifat dua arah. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi politik tidak hanya bergantung pada momentum pemilu, tetapi juga pada proses komunikasi politik yang berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai dan masyarakat, terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Faktor-faktor tersebut dirangkum dalam tabel 4.

Tabel 4. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat

Faktor	Keterangan
Literasi politik	Rendah, terutama di wilayah pedesaan
Kepercayaan terhadap partai	Sebagian masyarakat masih apatis
Faktor ekonomi	Banyak pemilih bekerja di luar daerah
Data pemilih	Masih terdapat ketidaksesuaian
Politik transaksional	Masih dijumpai di masyarakat

Sumber: Hasil wawancara, 2025.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4, faktor literasi politik dan tingkat kepercayaan terhadap partai politik menjadi determinan utama dalam menentukan kualitas partisipasi politik masyarakat. Rendahnya pemahaman politik dan melemahnya kepercayaan publik berdampak pada sikap apatis dan kejenuhan politik. Dalam kerangka

ekologi pemerintahan, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya interaksi antara masyarakat sebagai lingkungan sosial dengan aktor politik, sehingga keseimbangan sistem pemerintahan belum sepenuhnya tercapai.

Kejenuhan politik masyarakat juga dipengaruhi oleh intensitas pelaksanaan pemilu yang relatif sering. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

Jenuh, karena seringnya pemilu yang dilaksanakan (Pemilu, Pilkada, Pilkades) menjadi jenuh, tapi semoga dengan pemilihan serentak ini dapat menghilangkan kejenuhan itu. (Wawancara dengan Direktur Eksekutif cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, 26 November 2025).

Selain faktor kejenuhan, mobilitas ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi partisipasi politik. Banyak masyarakat usia produktif yang bekerja di luar daerah sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal. Kondisi ini dijelaskan dalam pernyataan berikut:

Pemilu juga berbeda dengan Pildes yang dimana orang-orang dari luar kota di fasilitasi untuk pulang ke desa untuk ikut serta dalam pildes, sedangkan ketika pemilu orang-orang dari luar juga enggan untuk pulang karena masih punya kerjaan disana. (Wawancara dengan Direktur Eksekutif cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, 26 November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor struktural dan sosial-ekonomi turut memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, peningkatan partisipasi politik tidak hanya bergantung pada upaya partai politik, tetapi juga memerlukan kebijakan dan mekanisme yang mampu mengakomodasi kondisi sosial masyarakat secara lebih inklusif.

Posisi Partai Demokrat dalam Kompetisi Politik Lokal

Jika dilihat dari perolehan jumlah suara yang di dapat, hal ini menjadi Indikator Peran Partai Demokrat terlaksana dengan baik, Jika dibandingkan dengan partai politik lain, Partai Demokrat menempati posisi perolehan suara tertinggi pada Pemilu Legislatif 2024, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Legislatif 2024 Kabupaten Pandeglang

Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
Partai Demokrat	97.734	6
Partai Golkar	91.957	7
Partai Gerindra	91.655	7
PKB	94.901	6
PKS	80.172	6

Sumber: KPU Kabupaten Pandeglang, diolah peneliti, 2025.

Tabel 5 menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat relatif lebih tinggi dibandingkan partai lain. Namun perolehan jumlah suara tidak menambah kursi yang di dapat, hal ini dikarenakan Hal ini disebabkan oleh mekanisme konversi suara ke kursi dalam sistem proporsional terbuka yang digunakan pada Pemilu Legislatif, di mana distribusi kursi sangat dipengaruhi oleh sebaran suara antar daerah pemilihan serta persaingan internal antarkandidat dalam satu partai.

Selain itu, meskipun terjadi peningkatan suara secara agregat, konsentrasi suara Partai Demokrat di beberapa daerah pemilihan belum cukup kuat untuk melampaui ambang batas perolehan kursi tambahan. Fragmentasi suara antar calon legislatif dalam satu dapil juga berkontribusi terhadap stagnasi jumlah kursi, meskipun secara total partai memperoleh peningkatan dukungan. Dengan demikian, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat lebih tercermin pada aspek elektoral berupa perolehan suara, namun belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan representasi politik di lembaga legislatif daerah. Hal ini dapat dipahami sebagai hasil dari keberlanjutan peran partai dalam ekosistem pemerintahan lokal, khususnya dalam membangun partisipasi politik masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang periode 2022–2027 di bawah kepemimpinan Bapak M.M. Fuhaira Amin, SE. berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif 2024. Keberhasilan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh citra nasional partai, melainkan oleh strategi kepemimpinan lokal yang menekankan pendekatan kekeluargaan, komunikasi politik yang persuasif, serta penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Melalui kegiatan roadshow, silaturahmi, dan konsolidasi internal, Partai Demokrat mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap partai.

Dalam perspektif ekologi pemerintahan, Partai Demokrat berfungsi sebagai aktor penghubung yang menjaga keseimbangan interaksi antara masyarakat, sistem politik, dan lingkungan sosial-ekonomi lokal. Peran ini tercermin melalui pelaksanaan pendidikan politik, pendekatan langsung kepada masyarakat, kegiatan sosial yang berkelanjutan, serta dukungan terhadap pemberdayaan UMKM dan promosi potensi wisata daerah. Kehadiran partai yang konsisten di tengah masyarakat membedakan Partai Demokrat dari partai lain yang cenderung aktif secara temporal, sehingga berkontribusi pada peningkatan loyalitas politik di tingkat akar rumput.

Meskipun demikian, partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pandeglang masih didominasi oleh pola elektoral-prosedural, ditandai dengan tingginya kehadiran pemilih di TPS namun rendahnya keterlibatan dalam aktivitas politik non-elektoral. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi politik, sikap apatis sebagian masyarakat, faktor ekonomi dan mobilitas kerja, kejenuhan politik akibat frekuensi pemilu, serta praktik politik transaksional. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik yang lebih substantif masih memerlukan upaya berkelanjutan, baik dari partai politik maupun dari kebijakan pemerintah daerah.

Secara elektoral, Partai Demokrat berhasil meraih perolehan suara tertinggi pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Pandeglang. Namun, peningkatan suara tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi penambahan kursi legislatif akibat mekanisme sistem proporsional terbuka dan fragmentasi suara antar calon. Dengan demikian, peran Partai Demokrat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat telah menunjukkan hasil positif secara kuantitatif, tetapi masih memerlukan penguatan strategi jangka panjang untuk mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif, substantif, dan berkelanjutan dalam demokrasi lokal Kabupaten Pandeglang.

REFERENSI

- Amanah, S., & Sa'adati, T. I. (2021). Transformasi politik: Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Kesadaran Politik Masyarakat pada Pemilu 2019. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(2), 115–126.
- Andrian, A. (2023). Komunikasi Politik Partai Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Rakyat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1234–1245.
- Fatiya, N. R., & Windawati, P. (2025). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kota Medan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 45–58.
- Ghufron, M. (2024) Pokok-Pokok Teori Ilmu Politik. PT. Anak Hebat Indonesia, 179-225
- Pratiwi, L. (2025). Peran partai politik dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1), 1–12.
- Susanti, R. (2025). Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Civitas: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, 5(1), 67–78.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Profil Demokrasi Lokal Indonesia*. Jakarta: Kemendagri.
- KPU Kabupaten Pandeglang. (2019). *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019*. Pandeglang: KPU Kabupaten Pandeglang.
- KPU Kabupaten Pandeglang. (2024). *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2024*. Pandeglang: KPU Kabupaten Pandeglang.
- KPU Kabupaten Tegal. (n.d). *Sejarah Pemilu Indonesia masa reformasi*. Diakses 29 Desember 2025, dari <https://kab-tegal.kpu.go.id/page/read/sejarah-pemilu-indonesia-masa-reformasi>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MPR RI. (2017). *Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang dasar 1945*.
- MPR RI. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Thoha, M. (2012). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia